PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT KERJA : **DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CUCU**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **1000212**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/178 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/222 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 173.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU/ SIGRA 1.2 MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BBO-L A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOTOR, HONDA A1F02N37M 1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	155.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	146.298.447
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	1.924.298.447
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.924.298.447

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.